

# Racialising French Practices of Secularism (*Laïcité*): A Portrait of the ‘Cyber-Abuse’ of Muslim and Islamic Attributes on Twitter Platforms in 2023

JISPO  
Jurnal Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik  
2024, Vol. 14, No. 1: 23-58  
[https://journal.uinsgd.ac.id/  
index.php/jispo/index](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index)  
© The Author(s) 2024

**Naflah Rifqi\***

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang,  
Indonesia

**Kayan Manggala**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang,  
Indonesia

**Ahmad Kholil**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang,  
Indonesia

## **Abstract**

*This study is motivated by the ongoing debates surrounding France and Islam over the past decade, particularly the re-emergence of laïcité as a historical ideology rooted in the late 18th century. The research aims to examine how French citizens express their perspectives on issues related to Islam, Islamofobia, and Muslim identity through narratives on Twitter, and to analyze how the racialization and marginalization of laïcité are perceived comprehensively. Using tweet harvesting for data collection and analysis facilitated by MAXQDA, the study identifies key events in 2023 that sparked public discourse: the ban on the abaya in schools and the celebration of Hanukkah at the Presidential Palace. Analysis of tweet content reveals three primary groups of public opinion: feminists (notably in the context of the abaya), nationalists who advocate for laïcité, and neutral humanists who, while often critical, also challenge the racialization of political actions. In addition to the frequent use of offensive language and calls for the exclusion of Muslims opposing government policies, secondary sources indicate tangible forms of racialization in society. These findings highlight that many view the Muslim population as outsiders, despite being born and raised in France.*

---

\* Corresponding author:

Naflah Rifqi

Alamat: Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang

Email: [naflah.rifqi123@gmail.com](mailto:naflah.rifqi123@gmail.com)

**Keywords**

*Echo chambers, epistemology, evidence, fact-checking algorithms, journalism*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan yang sedang berlangsung seputar Prancis dan Islam selama satu dekade terakhir, terutama munculnya kembali *laïcité* sebagai ideologi historis yang berakar pada akhir abad ke-18. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana warga Prancis mengekspresikan perspektif mereka tentang isu-isu yang berkaitan dengan Islam, Islamofobia, dan identitas Muslim melalui narasi di *Twitter*, serta menganalisis bagaimana rasialisasi dan marjinalisasi *laïcité* dipersepsikan secara komprehensif. Dengan menggunakan *tweet harvesting* untuk pengumpulan dan analisis data yang difasilitasi oleh MAXQDA, penelitian ini mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2023 yang memicu wacana publik: pelarangan abaya di sekolah-sekolah dan perayaan *Hanukkah* di Istana Presiden. Analisis konten tweet mengungkapkan tiga kelompok utama opini publik: feminis (terutama dalam konteks abaya), nasionalis yang mengadvokasi *laïcité*, dan humanis netral yang, meskipun sering kali kritis, juga menentang rasialisasi tindakan politik. Selain seringnya penggunaan bahasa yang menyinggung dan seruan untuk mengucilkan Muslim yang menentang kebijakan pemerintah, sumber-sumber sekunder menunjukkan bentuk-bentuk rasialisasi yang nyata dalam masyarakat. Temuan-temuan ini menyoroti bahwa banyak orang memandang populasi Muslim sebagai orang luar, meskipun mereka lahir dan dibesarkan di Prancis..

**Kata Kunci**

Algoritma cek fakta, bukti, epistemologi, jurnalisme, ruang gema

**Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade terakhir, Muslim di Eropa, khususnya Prancis, menghadapi tantangan pada beragam aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya sebagai akibat dari status mereka sebagai masyarakat minoritas. Sejak awal abad ke-21, istilah “Islam” sering kali diasosiasikan dengan kata “terorisme” dan “radikalisme”, sehingga memicu tindakan rasis dan diskriminatif, baik di tingkat sosial maupun politik. Fenomena ini

diperparah oleh sentimen publik negatif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk populisme sayap kanan melalui produk hiburan seperti film, representasi negatif Muslim di media, dan wacana publik yang bias (Labidi 2021; Omar 2020).

Krisis pengungsi tahun 2015 memperburuk xenofobia di Eropa, khususnya terhadap imigran Muslim. Munculnya partai sayap kanan radikal, seperti AfD di Jerman dan Front Nasional di Prancis, menandakan persimpangan politik di Eropa (Bell, Valenta, and Strabac 2021). Pada dasarnya, benua ini sedang diuji komitmennya terhadap hak asasi manusia, toleransi, dan pluralisme. Peningkatan xenofobia dan gerakan ultra-nasionalis berkaitan erat dengan meningkatnya Islamofobia (Kalmar 2020).

Studi menunjukkan peningkatan sentimen negatif terhadap Muslim di Eropa Barat sejak akhir 1980-an, bahkan melebihi sentimen anti-imigran (Bell, Valenta, and Strabac 2021; Kalmar 2020). Laporan tahunan Islamofobia Eropa oleh Enes Bayrakli (2023) mencatat Prancis, Austria, dan Denmark sebagai negara paling rentan terhadap Islamofobia pada 2022, dengan Prancis dan Austria mewakili Eropa Barat, dan Denmark mewakili Eropa Utara (Ali 2023; Bayrakli and Hafez 2023b).

Laporan Islamofobia Eropa 2022 (Bayrakli and Hafez 2023a) mencatat insiden anti-Muslim di berbagai negara Eropa, termasuk Belgia, Austria, Bosnia, Belanda, Italia, Spanyol, Inggris, Jerman, Finlandia, Denmark, Hungaria, Kosovo, Bulgaria, Republik Ceko, Rumania, Slovenia, dan Prancis. Laporan komprehensif ini menunjukkan kerentanan Islam di Eropa. Untuk melanjutkan penelitian tentang Islamofobia di Eropa, kami mengkaji Prancis, salah satu negara yang dianggap paling Islamofobia.

Sejak 2015, terjadi serangkaian kontroversi terkait Islam di Prancis, dimulai dengan penerbitan kartun Nabi Muhammad oleh majalah Charlie Hebdo, yang memicu serangan teroris oleh Said dan Cherif Kouachi, menewaskan 12 orang dan melukai 11 lainnya (Sukarwo 2020; Politzer and Alcaraz 2023). Dalam 10 bulan, Prancis mengalami dua serangan teroris yang menewaskan 146 korban. Collectif contre L'Islamofobia (CCIF) mencatat peningkatan tindakan kriminal berbasis Islamofobia setelah serangan Charlie Hebdo (Islamy and Andriyani 2021, 42).

Beragam peristiwa ini memunculkan ketegangan antara masyarakat Prancis yang mayoritas non-muslim dengan sesama warga negara mereka

yang beragama Islam. Dalam informasi tahunan CCIF semacam yang tercetak pada lukisan di dasar ini, perbuatan Islamofobia bertambah cepat sebesar 18, 5%, dari 764 permasalahan di tahun 2014 jadi 905 di tahun 2015 (Islamy and Andriyani 2021). Di tingkat global, saat itu muncul tagar yang mendunia yaitu *#JeSuisCharlie* yang artinya aku adalah Charlie sebagai bentuk solidaritas terhadap Charlie Hebdo. Usai peristiwa tersebut, Presiden Prancis, Emanuel Macron menyebut Islam sebagai agama yang sedang mengalami krisis di tingkat global. Pidato itu merupakan bentuk pembelaan pemerintah Prancis terhadap kebebasan berekspresi di negara mereka yang dalam perspektif Macron sedang mengalami ancaman (Sukarwo 2020).

Ketegangan kembali muncul pada 2020 dengan pembunuhan Samuel Paty, seorang guru sejarah, oleh seorang Muslim keturunan Chechnya. Pembunuhan ini dipicu oleh viralnya video protes orang tua murid terhadap penggunaan kartun Nabi Muhammad di kelas. Reaksi keras publik Prancis dan pidato Presiden Macron yang dianggap menghina Islam memicu tagar *#BoycottFranceProduct* dan *#ShameOnYouMacron*. Prancis kemudian merancang undang-undang yang membatasi kegiatan dakwah Islam.

Fenomena pembatasan ekspresi keagamaan di Prancis, khususnya yang berkaitan dengan Islam bukanlah suatu hal yang baru terjadi. Sejarah mencatat bahwa fenomena tersebut berawal dari kontroversi jilbab pada 1989, ketika tiga siswi Muslim dikeluarkan dari sekolah karena menolak melepas jilbab (Leyva 2016). Rentetan kasus berkenaan dengan diskriminasi pemeluk agama Islam terus berlangsung. Pada tahun 2005 pihak kepolisian dan CNCDH setidaknya mencatat peningkatan kasus kekerasan dan ancaman terhadap imigran Afrika Utara dan Muslim. Pihak Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) memaparkan terdapat 352 kasus kekerasan dan ancaman kepada imigran dari Afrika Utara atau kepada umat Muslim, 266 merupakan tindakan ancaman dan 64 sisanya merupakan tindakan kekerasan (EUMC 2006, 73).

Menarik kembali atas wujud kesetiaan Prancis terhadap sekularisasi, sejak awal, cikal bakal pemisahan agama dan politik ini bersumber dari objek atribut muslim, jilbab/hijab. Dari narasi sistematis yang disampaikan oleh Sukarwo bahkan sebelum banyaknya aksi terorisme muslim bermunculan, telah terjadi isu diskriminasi terhadap 3 siswi Muslimah yang memakai jilbab di sekolah-sekolah menengah daerah Creil, bagian pinggiran Kota di

Paris pada tahun 1989. Dalam referensi lain, di tahun peringatan dua abad revolusi Prancis itu, ketiga gadis muda dikeluarkan dari sekolah menengah Creil akibat menolak melepas cadar mereka. Data berikutnya adalah kasus rasisme di tahun 2004 (131 laporan) dan di tahun 2005 (65 laporan) yang diterima basis data 'STIC' Kepolisian Prancis<sup>1</sup> terhadap warga beragama Islam. Kemudian.

Alhasil untuk memproteksi rakyatnya dari tindakan demikian, pemerintah mengeluarkan Undang-undang *laïcité* pada tahun 2004, yakni berisi pelarangan penggunaan simbol atau pakaian yang menunjukkan identitas suatu kelompok agama tertentu di sekolah negeri Prancis. Simbol-simbol keagamaan yang dimaksud adalah jilbab bagi umat Muslim, salib berukuran besar, Kippah Yahudi, dan sorban Sikh. Wacana pelarangan di dunia pendidikan ini kemudian merambah pada konteks ekspresi keagamaan di area publik (Indira Rafsitahandjani and Firdaus 2017).

Prancis berhasil menerbitkan Kebijakan pelarangan *Niqab* dan *Burqa* yang membutuhkan waktu 1 tahun hingga akhirnya diterapkan pada tahun 2011 sejak Rancangan Undang-Undang tersebut mulai diperkenalkan oleh Perdana Menteri Francois Fillon di Majelis Nasional pada tanggal 19 Mei 2010. Undang-Undang No. 2010-1192 pada 11 Oktober 2010 atau dinamakan *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*; melarang penutup kepala yang menutupi wajah di ruang publik. Ruang publik yang dimaksud di sini adalah transportasi publik, pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat pendidikan, rumah sakit, klinik, pengadilan, kantor pemerintahan, dan lain-lain (Fekete 2004; Indira Rafsitahandjani and Firdaus 2017).

Tidak cukup disana, Pada tahun 2021, pemerintah Prancis juga mengesahkan RUU yang melarang anak perempuan di bawah 18 tahun memakai jilbab di depan umum dan ibu berjilbab mendampingi anak dalam kunjungan sekolah. Hal tersebut memicu tagar #HandsOffMyHijab menjadi viral pada beragam *platform* media sosial. RUU ini dikritik karena dianggap mendiskriminasi sekitar 5 juta Muslim di Prancis (Khamis 2023; Sukabdi et al. 2023).

Adapun tujuan awal Prancis bahwa *laïcité* adalah langkah preventif mereka untuk menangkal aksi terorisme dan radikalisme dapat diterima.

<sup>1</sup> Database kepolisian ini merupakan wewenang dan tanggung jawab DCRG (Direction Centrale des Renseignements Generaux). DCRG meneruskan informasi yang terdapat dalam database kepada Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme). Polisi tidak mempublikasikan informasi ini sendiri, tetapi dipublikasikan melalui laporan tahunan CNCDH.

Namun dalam akar sejarahnya, bahwa aksi terorisme - pelanggaran identitas keagamaan - pelanggaran *Niqab/Burqa* - kasus diskriminasi – *xenophobia* merupakan sebuah landasan tersentuhnya kembali *laïcité* ini memiliki subjek utama yakni para pemeluk Islam. Tak ada sasaran agama lain secara dominan menjadi alasan adanya *laïcité*. Sehingga tajuk implisit bahwa politik Prancis beserta ideologi dan praktiknya lekat pada rasialisasi tinggi pada kaum minoritas Muslimin di negaranya tak dapat dihindarkan. Sekulerisme berbasis identitas ini menempatkan Islam sebagai agama asing bagi budaya Prancis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Malogne-Fer 2017; Ragazzi 2023, 709).

Memang tak bisa secara gamblang mengasumsikan bahwa Prancis ingin memisahkan segala hal yang berbau Islam dalam kedok ‘kembali Prancis pada *laïcité*’. Namun tak hanya direpresentasikan oleh regulasi dan politiknya saja, dalam artikel ini penulis akan menyoroti bagaimana dinamika opini warga sipil Prancis yang ditorehkan dalam sosial media sebagai implementasi konsep *laïcité* yang realitanya juga memiliki rasialisasi terhadap afiliasi Islam menggunakan pendekatan kualitatif. Kami berfokus untuk memecahkan dua hal:

1. Bagaimana representasi warga lokal Prancis terhadap isu terkait Islam, Islamofobia, dan atribut muslim yang mereka visualisasikan dalam narasi-narasi *tweet* di media sosial *Twitter*.
2. Bagaimana bentuk rasialisasi atau marginalisasi atas konsep *laïcité* ini, yang dalam tataran implementasinya cenderung memojokkan Islam dan menempatkan Islam sebagai bagian luar negaranya.

Guna membatasi penelitian ini, sumber data utama penelitian yang akan diangkat ialah postingan *tweet* yang mengandung persepsi pengguna *Twitter* Prancis terkait atribut muslim (dengan *keyword* : Islam, Islamofobia, hijab, *Niqab*, *Burqa*, *abaya*, jilbab, *cadar*) dalam rentang tahun 2023. Alasan penggunaan *Twitter* sebagai sumber variabel penelitian dikarenakan penyebaran Islamofobia paling potensial terjadi di dalam platform ini (Corral et al. 2023, 3). Sedang sumber data sekunder merupakan kajian pustaka dari buku, artikel jurnal, dan website yang relevan. Alat pengumpulan data primer menggunakan *software* google collab dan Nvivo sebagai alat bantu dalam melakukan analisa.

## Genealogi Islamofobia Islam di Eropa

Sebelum memasuki potret *Cyber-abuse* atribut Muslimah dalam media *Twitter* Prancis, narasi berikut akan menjelaskan secara ringkas mengapa Islamofobia dapat subur menjamur di wilayah dengan minoritas muslim. Dalam asesmen historisnya, propaganda Islamofobia berakar pada rasa kecemasan dan ketidakamanan (*insecurity*) sebagian masyarakat yang telah termakan isu terorisme Islam sejak peristiwa 9/11, yang sangat dipengaruhi oleh politik populis sayap kanan (Farkhani, Baidhaw, and Kuswaya 2021; Kalmar 2018). Lebih lanjut, imajinasi dan realitas politik di Jerman semakin menganggap kehadiran Muslim sebagai 'orang lain' di dalam dan di luar batas-batas negara dengan anggapan bahwa 'Islamisasi' dan 'Islam Global' adalah ancaman eksistensial dan keamanan skala nasional (Simpson 2020).

Wacana politik Islamofobia kontemporer di Eropa sebagian besar bersifat rasis, meskipun bersembunyi di balik jubah kefanatikan anti-Islam (Lauwers 2019). Retorika kebencian terhadap Islam di era kontemporer sangat dipengaruhi oleh perkembangan model orientalisme Amerika yang dimotivasi oleh perang atau balas dendam terhadap terorisme (Farkhani, Baidhaw, and Kuswaya 2021). Tak hanya itu, pemerintah di Austria dan Italia (Eropa Timur) mengikuti gaya "Amerika-nya" Donald Trump yang menjadikan Islamofobia masuk dalam politik praktis (Kalmar 2018).

Pada dasarnya orang-orang yang anti-Islam atau Islamofobia murni diperbolehkan, karena mereka hanya memberikan penolakan ideologis terhadap ajaran Islam. Tentu wajar saja jika tidak setuju dengan konsep ibadah atau teologis agama lain. Namun jejak diskriminasi, penekanan terhadap LSM Muslim, serangan fisik dan pembunuhan terhadap puluhan muslim tanpa alasan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ("*A Summary of Attacks on Muslims in Western Countries*" 2019) dan berbagai sikap illiberalisme lainnya terhadap muslim bukanlah ideologi anti-Islam yang umum dan wajar lagi, melainkan sudah memasuki tahap rasisme anti-muslim (Mendelski 2019). Dalam lingkup internasional, jejak Islamofobia ini telah menyebabkan ketidakstabilan dan peningkatan kekerasan, timbulnya ketidakadilan atas hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan. Maka dari itu, adalah suatu keniscayaan bila ketimpangan ini akan berimplikasi konkret pada kemunculan aksi ekstremis, jihadis serta bangkitnya spirit pembentukan Negara Islam sebagai aksi 'membela diri' akibat perlakuan terhadap kaum muslimin yang demikian (Massoumi 2020; Scrinzi 2023).

Dalam upaya mengklasifikasikannya menjadi argumen terstruktur, setidaknya terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi isu Islamofobia secara global (Wijaya and Nursyabani 2022; Rofiqi 2002). Pertama, opini tentang Islam dalam Runnymede Trust Report. Laporan Runnymede Trust dipublikasikan pada tahun 1997 dengan Judul utuh laporan tersebut, sebagaimana mengutip Todd, adalah *Islamofobia: A Challenge for Us All*. Beberapa laporannya merujuk pada Islam sebagai agama yang satu dan statis, Islam terpisah daripada yang lain, Islam sebagai inferior, Islam sebagai musuh, Islam agama manipulatif, aksi diskriminasi rasial terhadap Muslim dapat dibenarkan, kritik yang dilancarkan oleh Muslim kepada Barat tidak dianggap, serta wacana anti-muslim adalah suatu hal yang alami (Wijaya and Nursyabani 2022).

Kedua, pasca upaya *framing* Islam sebagai ancaman, peristiwa pelik yang menjadi akar misinterpretasi Islam secara global adalah tragedi Selasa kelabu, pengeboman *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001. Yakni serangkaian empat bunuh diri terhadap beberapa target di New York City dan Washington. Kelompok militan Al-Qaeda menabrakkan dua pesawat jet bajakannya ke WTC, pesawat ke-3 ke Pentagon, Arlington, Virginia dan pesawat ke-4 yang gagal mencapai Washington DC sehingga ia jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Peristiwa ini meraup 3.000 korban yang menominasinya menjadi aksi terorisme dengan jumlah korban terbanyak (Wijaya and Nursyabani 2022). Tindak fundamentalisme ini memang diaminkan banyak pihak. Indonesia pun juga turut mendapatkan aksi pengeboman di salah satu gereja Bali dan Surabaya. Terdapat tiga hal yang menguatkan paham Islamofobia berkaca pada 9/11. Pertama, doktrin Islam sebagai agama teroris. Kedua, opini negatif tentang Islam yang dibangun oleh media. Ketiga, anggapan Islam sebagai minoritas kesulitan melakukan integrasi. Dengan demikian, penyebab Islamofobia yang dihasilkan pasca 9/11 ini lebih kepada pandangan tertutup kepada umat Islam dan kurangnya informasi yang akurat komprehensif mengenai Islam.

Ketiga, seperti halnya dipaparkan di bagian sebelum ini, terdapat traumatis sejarah teologi yang masih menghantui tensi Kristen dan Islam di Barat, yakni benturan ajaran teologis serta perang Salib (Wijaya and Nursyabani 2022). Sebagai contoh menurut Asad, sekalipun Barat menolak klaim ajaran Hindu dan Budha, tetapi mereka mampu bersikap objektif dan reflektif terhadap keduanya. Hal yang kontras ketika mereka berhadapan



dengan Islam yang bagi Asad membuat Barat kehilangan daya intelektual dan objektivitas mereka (Sukarwo 2020).

Dengan genealogi sebagaimana melanda seluruh Eropa, juga telah penulis jelaskan secara singkat pada bagian pendahuluan, Islam Eropa menjadi rentan sekuritasnya. Terlebih dalam kasus Prancis, hasil dari *The European Monitoring Research Center* pada tahun 2002 mengobservasi bahwa pasca tragedi 9/11 terjadi eskalasi kebencian terhadap muslim di Eropa terutama Prancis. Perubahan sikap atau perilaku ini disebabkan oleh persepsi (dari beberapa orang Prancis) bahwa Islam dan Muslim secara umum harus bertanggung jawab atas serangan teroris (Sukabdi et al. 2023). Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat berbagai hal diskriminatif, rasialisasi hingga kekerasan verbal/fisik ini justru menjadi poin potensial adanya aksi terorisme oleh warga negara muslim yang netral (tak memiliki orientasi radikal).

### **Kerangka Analitis: Konsep Ideologi *Laïcité* sebagai Cita-cita Politik Negara Prancis**

Tanggal 11 Desember 2003, Jacques Chirac, Presiden Prancis saat itu, menerima laporan Komisi Refleksi tentang Penerapan Prinsip sekulerisme di Republik guna mendamaikan persatuan bangsa dan menghormati keragaman, dokumen ini membuat 26 rekomendasi yang bertujuan untuk mengadaptasi sekulerisme Prancis terhadap tantangan baru yang ditimbulkan oleh keragaman budaya dan agama (Leyva 2016).

Banyak derivasi makna sekulerisme yang saling berpolarisasi dalam lintas kesejarahannya. Namun dengan meminjam dua konsep sekulerisme yang disebutkan oleh Leyva<sup>(2016)</sup>, secara umum dibagi menjadi dua prinsip: Pertama, prinsip pemisahan antara agama dan politik dan kedua, prinsip netralitas negara dalam menghadapi berbagai keyakinan agama atau filosofis. Kedua prinsip ini tidak berakhir pada diri mereka sendiri. Jika prinsip pemisahan menyiratkan, antara lain, bahwa tidak ada keyakinan agama atau filosofis yang memiliki hak untuk berbicara atas nama negara, dan jika prinsip netralitas, di sisi lain, menyiratkan bahwa negara tidak boleh mendukung salah satu dari keyakinan ini, justru untuk menjamin kesetaraan warga negara dan kebebasan hati nurani mereka. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah sebagai berikut: di satu sisi, jika Negara tidak netral, kesetaraan antara warga negara dalam bahaya,

karena otoritas publik “berhak untuk memperlakukan individu secara berbeda sesuai dengan keyakinan agama mereka, bahkan ketika kebebasan tertentu berlaku”. Di sisi lain, jika tidak ada pemisahan antara kekuatan agama dan politik, kebebasan hati nurani terancam karena pelaksanaan kewarganegaraan tergantung pada kepatuhan individu terhadap agama publik (Leyva 2016).

Secara historis, “Sekulerisme republik didasarkan pertama dan terutama pada prinsip otonomi politik, yang diperkenalkan ke dalam undang-undang oleh Revolusi 1789”, memiliki kandungan makna bahwa gagasan *laïcité* mendorong ruang privatisasi agama dan perluasan nilai-nilai sipil dalam kehidupan warga negara. Jika sebelum masa revolusi, manusia dianggap bergantung pada Tuhan, setelah 1789 mereka diharapkan untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan otonom, tanpa transendensi menjadi referensi yang diperlukan untuk menentukan keberadaan mereka sendiri, seperti contoh sekulerisasi pada lembaga pernikahan, kesehatan dan pendidikan (Mudzakkir 2013). Selama Republik Ketiga (1870-1940) sekulerisme dipandang sebagai persyaratan prinsip republik Prancis. Coraknya sejak awal, sekulerisme republik Prancis dibangun berdasar penentangan terhadap Katolik, yang konsepsi transendennya tentang asal usul kekuasaan kontras dengan konsepsi imanentis kaum republiken. Namun saat ini, didapati bukan lagi Gereja Katolik yang menjadi pusat perhatian, tetapi Islam (Leyva 2016).

Berpijak atas upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dalam sejarahnya, politik Prancis mencoba kembali pada fundamentalis ‘lama’; ideologi *Laïcité* (sekulerisasi). Ideologi ini ditransformasikan pada arus utama sejak 1989 oleh populis sayap kanan, Front Nasional. Terkhusus pada sekuritisasi sistematis atas Islam yang telah dicap ancaman bagi ‘rakyat’. pemerintah lokal Prancis memfasilitasi pembungkahan ulang *laïcité* yang lebih luas sebagai mekanisme pertahanan Republik, yang beroperasi terutama melalui sistem sekolah. *Laïcité* semakin banyak digunakan dalam wacana arus utama dan langkah-langkah legislatif untuk mengatasi dua masalah keamanan yang saling terkait: keamanan langsung sekolah dengan mempromosikan netralitas, dan kesejahteraan Republik secara keseluruhan melalui pencegahan radikalisme (Peker 2021).

Paham sekulerisme yang dianut Prancis membuat negara ini secara tegas menyatakan bahwa tidak adanya campur tangan agama dalam pemerintahan. Setiap individu berhak dalam memutuskan agama apa yang

akan dianut. Tidak ada kewenangan bagi sebuah negara untuk mengatur bagaimana warga negaranya menjalankan kegiatan beribadah terhadap sebuah agama yang dianutnya. Kebebasan menjalankan ibadah bahkan tertuang dalam sebuah deklarasi, *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negaranya) merupakan deklarasi yang dikeluarkan pemerintah Prancis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyatakan kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini tertulis dalam pasal 10 konstitusi Prancis yang berbunyi, “*bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, bahwa dalam hal agama, selama tidak mengganggu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum*”. Prancis adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama (Indira Rafsitahandjani and Firdaus 2017).

Namun dalam sisi praktik, partai ini, yang disebut dengan French Rassablement National (RN), menggunakan Katolik dan *laïcité* sebagai penanda identitas kultural untuk melawan Islam untuk memobilisasi para pemilih di sekitar pembelahan identitas baru antara “kaum liberal-kosmopolitan dan populis-komunis”. Alih-alih pemulihan hubungan dengan posisi, etika, dan institusi kebijakan Kristen, penelitian (Cremer 2023) menemukan bahwa RN menjadi semakin sekuler dalam kebijakan, personel, dan pemilihnya. Temuannya menunjukkan adanya relevansi dalam literatur terkait populisme dan agama yang lebih luas, bukan hanya karena menunjukkan sentralitas politik identitas sayap kanan bagi partai-partai populis, tetapi juga karena hal ini menantang anggapan tradisional mengenai hubungan antara populisme sayap kanan dan agama dengan memberikan bukti bahwa di Eropa Barat, partai-partai tersebut semakin didominasi oleh sayap “*pasca-agama*”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep *laïcité* bukanlah hal baru. Ia sudah mendarah daging di negara Prancis sejak revolusi ke-3 nya (18470-1940), mereka berdiri atas asas sekulerisasi. Lebih jauh lagi mereka telah mempraktekkan *laïcité* bahkan di abad sebelumnya sekitar akhir abad-17 untuk memisahkan urusan publik dari adikuasa Gereja Katolik kala itu.
2. Tak heran apabila Prancis di tahun 2004, 2011, dan wacana tahun 2021 berupaya kembali pada konsep yang sekulerisasi ruang publik, terutama pada sekolah negeri<sup>2</sup>. Yakni dengan menghilangkan

<sup>2</sup> Namun dalam hal sekolah swasta, seperti halnya dicontohkan oleh (Fornerod 2023), sekolah Katolik yang memang berafiliasi pada agama tertentu diberikan kebebasan mengolah segala regulasi pendidikannya.

segala corak identitas keagamaan dan segala bentuk multikulturalis sehingga di mata politik dan publik, mereka adalah sama tanpa ada pembedaan agama, ras dan asal. Sehingga tak terkecuali agama Islam harus mematuhi aturan tersebut.

3. Dengan apapun corak pemahaman terkait *laïcité*, Prancis tetap membebaskan warganya memilih agama dan melakukan praktik peribadatan selama itu tidak mengganggu ketertiban sosial yang ditetapkan hukum.

Namun hal yang disayangkan adalah, tensi dan sensitifitas pada instrumen pemberlakuan regulasi sekuleritas ini tidak diiringi dengan cara yang ‘damai’(Fornerod 2023). Tak hanya kasus diskriminasi dari lingkup sosial kecil hingga pemerintahannya sendiri melakukan tindak yang merepresentasikan Islam memang bukan bagian dari Prancis. Hanya Islam yang ditekan dan menjadi objek utama dalam pola implementatif *laïcité*. Sehingga pemisahan politik dan agama ini bersifat rasial terhadap ‘ras’ Islam. Dalam bagian berikutnya penulis akan menyajikan hasil olah faktual baik dalam observasi lapangan (*Twitter*) dan praktik politik yang mengindikasikan adanya rasialisasi.

### **Potret Gegap Gempita Cyber-Abuse Pengguna Twitter Prancis di Tahun 2023 Terkait Term Atribut Muslimah dan Islam**

Media sosial sering dianggap sangat ampuh untuk mendorong opini ekstrem, karena lingkungan *Online* mendorong pembentukan ruang gema dan dengan demikian mengarah pada kesediaan yang lebih tinggi untuk mengekspresikan kebencian - terutama di tempat-tempat Online di mana anonimitas lebih kuat. Pada saat yang sama dengan tidak terbatasnya ruang dan waktu, platform media sosial memfasilitasi interaksi antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan ideologis yang berbeda (dan berpotensi bentrok), yang dapat menyebabkan konflik (Czymara et al. 2023). Tabel 1 menyajikan beberapa *tweet* yang mengarah pada diskriminasi identitas Muslimah, yang tergolong sebagai ‘*cyber-abuse*’ di kalangan muslim.

Tabel 1  
Tweet yang Mengarah pada Diskriminasi Identitas Muslimah

No	Tanggal	Username	Isi Postingan (Fr)	Isi Postingan (Eng)	Like	Link <i>Twitter</i>
1	28/08/2023	@gregory_boyer	#abaya Excellente nouvelle ! L’Etat doit se montrer intransigeant et ferme contre celles et ceux qui veulent mettre à mal les principes fondamentaux de notre République #Laïcité « L’Etat chez lui, l’Eglise chez elle ! »	#abaya Excellent news! The State must be intransigent and firm against those who want to undermine the fundamental principles of our Republic #Laïcité “The State at home, the Church at home!”»	8	<a href="https://twitter.com/gregory_boyer/status/1695896850757230803">https:// Twitter.com/ gregory_ boyer/status/ 1695 8968 5075 7230 803</a>
2	28/08/2023	@laurentbazin	Merci de confirmer par cette plainte que l’abaya relève donc bien - aux yeux des plus radicaux - de « l’exercice du culte musulman ».	Thank you for confirming with this complaint that the abaya is indeed – in the eyes of the most radical – “the exercise of Muslim worship”.	789	<a href="https://twitter.com/laurentbazin/status/1697988983760806063">https:// Twitter.com/ laurentbazin/ status/ 1697 9889 8376 0806 063</a>

Tabel 1 (Lanjutan)

3	05/09/2023	@giomarcelgio	ON SEN BRANLE DE TES PUTAIN D ABAYA DE MERDE LA CON DE TA RACEEEEEEE	We don't care about your fucking shitty abaya, your stupid raceeeee	5	<a href="https://twitter.com/giomarcelgio/status/1698977329689641140">https:// Twitter.com/ giomarcelgio/ status/ 1698 9773 2968 9641 140</a>
4	13/09/2023	@ RousseauPhili15	J'en peux plus de ces bourgeoises blanches qui veulent expier leur privilège de classe. Elles se croient révolutionnaires en se mobilisant pour que d'autres, "racisées" elles, aient la «liberté» de se soumettre aux injonctions d'un fascisme religieux. Ça pue le paternalisme.	I can't stand these white bourgeois women who want to atone for their class privilege. They believe themselves to be revolutionaries by mobilizing so that others, "racialized" themselves, have the "freedom" to submit to the injunctions of religious fascism. It reeks of paternalism.	766	<a href="https://twitter.com/RousseauPhili15/status/1702336500493680709">https://Twitter. com/Rousseau Phili15/status/ 1702 3365 0049 3680 709</a>

Tabel 1 (Lanjutan)

5	16/09/2023	@jmb75012	Tu bouffes à tous les râteliers panot... défendre les iraniennes et soutenir l'abaya en France,bonjour la contradiction !t'es pas crédible bouffonne	You eat at all the panot racks...defend Iranian women and support the abaya in France, hello contradiction! You're not credible buffoon	17	<a href="https://Twitter.com/jmb75012/status/1702968268854571357">https://Twitter.com/jmb75012/status/ 1702968268854571357</a>
6	20/09/2023	@Julien Odo**	Avec mon collègue @ ljacobelli, nous sommes allés à #Stains pour échanger avec la direction du lycée Utrillo sur la grève contre l'interdiction de l'#abaya. Nous avons été interdits d'entrer, privés de dialogue et ils ont osé appeler la police pour refouler deux députés. Honteux !	With my colleague @ ljacobelli, we went to #Stains to discuss with the management of the Utrillo high school about the strike against the ban on #abaya . We were banned from entering, deprived of dialogue and they dared to call the police to turn away two deputies. Ashamed !	1.8k	<a href="https://Twitter.com/JulienOdoul/status/1704209468483891698">https://Twitter.com/JulienOdoul/status/ 1704209468483891698</a>

Tabel 1 (Lanjutan)

7	21/09/2023	@Pavage***	Shame on @ONU_fr you invite a barbarian mullah #IRAN to make a speech in front of your assembly, you do not understand why France country of freedoms, enlightenment refuses the abaya! Stop you are complicit in the barbarities in Iran @ Le_Figaro	Shame on @ONU_fr, you invite a barbarian mullah #IRAN to make a speech in front of your assembly, you do not understand why France country of freedoms!, enlightenment refuses the abaya! Stop you are complicit in the barbarities in Iran @ Le_Figaro	3	<a href="https://twitter.com/PavageauSophie/status/1704575965962063946">https://Twitter.com/PavageauSophie/status/1704575965962063946</a>
8	02/10/2023	@labadiejean22	En étant du côté de l'abaya et du voile vous favorisez le contraire de la créolisation. Décidément vous ne réfléchissez pas ou vraiment mal.	By being on the side of the abaya and the veil you promote the opposite of creolization. You are definitely not thinking or really thinking badly.	-	<a href="https://twitter.com/labadiejean22/status/1708705380249833695">https://Twitter.com/labadiejean22/status/1708705380249833695</a>



Tabel 1 (Lanjutan)

9	03/10/2023	@dom2419	Collectif pour l'abaya : alliance de l'extrême gauche aveugle et de l'Islamisme https:// https:// bvoltaire. fr/?p=740005 via @bvoltaire	Collective for the abaya: alliance of the blind extreme left and Islamism https:// bvoltaire. fr/?p=740005 via @bvoltaire	-	<a href="https://Twitter.com/dom2419/status/1708913731835437206">https://Twitter.com/dom2419/status/1708913731835437206</a>
10	05/12/2023	@MarieThrse 33510	Oui c'est la France et c'est ma France ! la France n'es certainement pas des femmes avec le hijab ou une abaya point ! La France n'es pas musulmane Ne pas confondre la laïcité et l'origine fondamentale de la France une femme libéré « Mariane »	Yes! it's France and it's my France! France is certainly not women with the hijab or an abaya point! France is not Muslim Do not confuse secularism and the fundamental origin of France a liberated woman "Mariane"	687	<a href="https://Twitter.com/MarieThrse33510/status/1731992240388550798">https://Twitter.com/MarieThrse33510/status/1731992240388550798</a>

Tabel 1 (Lanjutan)

11	08/12/2023	@jjcambier	Entre une gauche à la dérive complaisante avec l’Islam politique et une extrême droite qui veut faire passer sa catho-laïcité pour une lanterne, l’arc républicain doit être solide sur ses bases laïques. La légèreté du chef de l’État en matière de #laïcité est inquiétante.	Between a drifting left complacent with political Islam and an extreme right which wants to pass off its catholic secularism as a lantern, the republican arc must be solid on its secular bases. The head of state’s lightness in matters of #laïcité is worrying.	70	<a href="https://Twitter.com/jjcambier/status/1733110591735091309">https://Twitter.com/jjcambier/status/1733110591735091309</a>
12	08/12/2023	@GarenShn	“Ils trouveront toutes les excuses du monde pour ne pas parler du problème: c’est psychiatrique, c’est social, c’est la faute de l’alignement de la lune et Jupiter pour ne pas parler des 3 I : Immigration, Insécurité, Islam. Ceux sont les causes de tous les problèmes en FR.”	“They will find all the excuses in the world not to talk about the problem: it’s psychiatric, it’s social, it’s the fault of the alignment of the moon and Jupiter not to talk about the 3 I’s: Immigration, Insecurity, Islam. These are the causes of all the problems in FR.”	399	<a href="https://Twitter.com/GarenShn/status/1732816582991110450">https://Twitter.com/GarenShn/status/1732816582991110450</a>

Tabel 1 (Lanjutan)

13	09/12/2023	@VallooValloo	Chers amis musulmans qui trouvez la laïcité Islamophobe... La laïcité est là depuis 1905 et était donc là bien avant vous ! Il ne fallait donc pas venir ! Il y a plein de pays musulmans dans le monde, vous avez l'embarras du choix ! #Laicite #Islam #LaMatinaleWE	Dear Muslim friends who find secularism Islamophobic... Secularism has been there since 1905 and was therefore there long before you! So you shouldn't have come! There are plenty of Muslim countries in the world, you are spoiled for choice! #Laicite #Islam #LaMatinaleWE	2.3 k	<a href="https://Twitter.com/VallooValloo/status/1733381553596588402">https://Twitter.com/VallooValloo/status/1733381553596588402</a>
14	11/12/2023	@atika_samrah	C'est toujours la même religion de merde !	It's still the same shitty religion!	1.6 k	<a href="https://Twitter.com/atika_samrah/status/1734183332596899936">https://Twitter.com/atika_samrah/status/1734183332596899936</a>
15	11/12/2023	@SylvieS77085290	L'Islam est incompatible avec la République française Êtes vous ok?	Islam is incompatible with the French Republic Are you OK?	4,1 k	<a href="https://Twitter.com/SylvieS77085290/status/1733919641913700389">https://Twitter.com/SylvieS77085290/status/1733919641913700389</a>

Data *tweet* pada Tabel 1 memberikan gambaran mengenai beragam sentimen publik di Prancis terkait isu Islam dan atribut Muslimah, khususnya abaya. Sejumlah *tweet* menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pelarangan abaya di sekolah. Para pendukung pelarangan ini umumnya berpandangan bahwa abaya merupakan simbol fundamentalisme atau ekstremisme Islam, sehingga pelarangannya dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan sekularisme (*laïcité*). *Tweet* dari

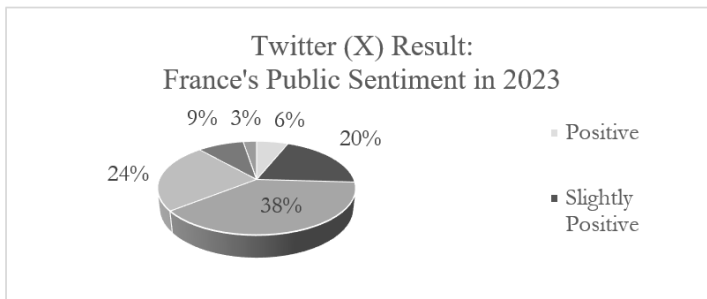
akun @gregory\_boyer, misalnya, menyambut pelarangan tersebut dengan antusiasme dan menyerukan ketegasan pemerintah. Senada dengan itu, tweet dari @laurentbazin juga mengaitkan abaya dengan “praktik ibadah Muslim” yang dipandang bertentangan dengan prinsip *laïcité*. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa *tweet* yang mendukung pelarangan abaya juga diwarnai dengan bahasa yang kasar dan penuh kebencian, seperti yang terlihat pada *tweet* dari @giomarcelgio. Hal ini mengindikasikan adanya sentimen anti-Islam yang melandasi dukungan terhadap pelarangan tersebut.

Di sisi lain, sejumlah *tweet* juga menunjukkan kritik terhadap Islam dan Muslim secara umum. Beberapa *tweet* tersebut mengandung generalisasi dan stereotip negatif, seperti *tweet* dari @RousseauPhili15 yang mengkritik “perempuan borjuis kulit putih” yang dianggap membela hak Muslimah untuk mengenakan abaya. *Tweet* ini menyiratkan anggapan bahwa semua atau mayoritas Muslim adalah fundamentalis atau ekstremis. Selain itu, terdapat pula *tweet* yang berisi penghinaan dan serangan pribadi terhadap mereka yang mendukung penggunaan abaya, seperti *tweet* dari @jmb75012 yang menggunakan bahasa yang sangat kasar dan tidak pantas.

Tidak hanya kritik terhadap Islam dan Muslim, terdapat pula *tweet* yang mengkritik kebijakan pemerintah terkait isu ini. Salah satu kritik yang muncul adalah mengenai ketidakkonsistenan penerapan *laïcité*. *Tweet* dari @Pavage\*\*\*, misalnya, menyoroti kontradiksi antara pelarangan abaya di Prancis dengan undangan bagi seorang ulama Iran untuk berpidato di PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan *laïcité* yang terkesan selektif dan menarget Muslim. Selain itu, beberapa *tweet*, seperti yang diunggah oleh @labadiejean22, menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan pemerintah, termasuk pelarangan abaya dan pembatasan simbol-simbol keagamaan lainnya, justru memicu dan memperkuat Islamofobia.

Secara keseluruhan, data *tweet* ini mencerminkan perpecahan di masyarakat Prancis terkait isu Islam dan *laïcité*. Terdapat polarisasi antara kelompok yang mendukung pelarangan abaya dan mengkritik Islam dengan kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dan membela hak Muslimah. Perdebatan dan saling serang di media sosial menjadi bukti nyata perpecahan ini. Data ini menggarisbawahi kompleksitas dan sensitivitas isu *laïcité* di Prancis, serta pentingnya dialog yang lebih inklusif dan konstruktif untuk menjembatani perbedaan dan mengurangi ketegangan antar kelompok di masyarakat.

Disamping itu dengan menggunakan fitur Tweet Harvest buatan Helmi Satria dalam software Google Collab, peneliti mencoba melakukan filtrasi tweet yang mengandung *keyword* ‘Hijab’ ‘Abaya’ ‘Burqa’ ‘Niqab’ dan ‘Islam’ dengan *geocode* (Prancis): 46.746759407254785, 2.7449114404518062 beradius 500km (sehingga data yang terinput ialah postingan yang diunggah di negara Prancis, alias peneliti ingin sebuah argumenasi asli warga lokal). Postingan yang terinput hanya dibatasi pada rentang waktu 1 Januari 2023 hingga 12 Desember 2023. Filtrasi ini menghasilkan  $n = 536$  postingan yang telah penulis terjemahkan ke dalam Bhs. Inggris dan Bhs. Indonesia seluruhnya. Analisis menggunakan software MAXQDA guna mengklasifikasi sentimen: *no sentimen*, *positive*, *slightly positive*, *neutral*, *slightly negative* dan *negative*. Persentase yang didapat dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1

Diagram hasil analisis sentiment publik terkait atribut Muslimah  
 $P = 33$ ,  $SP = 106$ ,  $Neu = 206$ ,  $SN = 129$ ,  $Neg = 48$ ,  $NS = 14$

Gambar 1 memberikan gambaran tentang sentimen publik di Prancis terkait atribut Muslimah yang diungkapkan melalui *tweet* di platform Twitter (X) sepanjang tahun 2023. Analisis terhadap 536 *tweet* yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sentimen netral mendominasi percakapan, dengan persentase mencapai 38%. Ini berarti sebagian besar *tweet* tidak secara eksplisit menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap atribut Muslimah, kemungkinan karena berisi informasi netral, pertanyaan, atau diskusi yang tidak memihak.

Selanjutnya, sentimen bernuansa negatif tercatat cukup signifikan, yaitu sebesar 24%. Angka ini mengindikasikan adanya ketidaksetujuan atau kritik tersirat terhadap atribut Muslimah, meskipun tidak diungkapkan dengan bahasa yang keras atau penuh kebencian. Sementara itu, sentimen

agak positif hanya mencapai 20%, menunjukkan bahwa dukungan atau penerimaan terhadap atribut Muslimah dan keberagaman relatif lebih rendah dibandingkan sentimen negatif atau netral.

Sentimen negatif dan positif masing-masing tercatat sebesar 9% dan 6%. Meskipun proporsinya relatif kecil, keberadaan sentimen negatif tetap menunjukkan adanya penolakan atau bahkan kebencian terhadap atribut Muslimah, sedangkan sentimen positif menunjukkan dukungan dan penerimaan. Terakhir, hanya 3% *tweet* yang dikategorikan tidak memiliki sentimen. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan algoritma dalam mengidentifikasi sentimen, misalnya pada *tweet* yang hanya berisi tautan atau gambar tanpa teks yang memadai.

Secara umum, Gambar 1 menjelaskan bahwa percakapan di Twitter terkait atribut Muslimah di Prancis selama tahun 2023 lebih banyak didominasi oleh sentimen netral, disusul oleh sentimen agak negatif. Meskipun terdapat sentimen positif, proporsinya relatif lebih kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa isu atribut Muslimah masih menjadi perdebatan dan memicu beragam pandangan di masyarakat Prancis. Perlu digarisbawahi bahwa analisis sentimen ini dilakukan menggunakan algoritma, sehingga kemungkinan terdapat bias atau keterbatasan dalam interpretasinya. Oleh karena itu, analisis kualitatif terhadap isi *tweet* tetap diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

Pada bagian interpretasi data di bawah ini, peneliti berupaya mereduksi sejumlah data yang paling mendekati pada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Berikut adalah rumusan transkrip hasil reduksi data yang mempresentasikan adanya diskriminasi atau rasialisasi terhadap atribut Muslimah dan objektivikasi Islam pada argumentasi publik Prancis di platform *Twitter* (X) 2023.

Berdasar modus yang ada, dalam kurun waktu 1 Januari hingga 12 Desember 2023, terdapat dua peristiwa besar yang menuai banyak kritikan dari pihak sisi pendukung Islam (positif) dan tidak (negatif), juga pihak netral terkait (1) pelarangan abaya di sekolah (4 September 2023) dan (2) perayaan *Hannukah* di Lysee Palace (8 Desember 2023). Data sekitar Bulan September menunjukkan beberapa opini warga lokal yang merepresentasikan sisi negatif terhadap abaya. Sedang data sekitar Desember menyatakan sisi negatif terkait Islam secara umum, karena adanya ketimpangan praktik politik akan *laïcité*.

Terdapat beberapa interpretasi yang dapat penulis simpulkan dalam narasi-narasi di atas :

Pada konteks pelarangan abaya hadir dalam Lembaga pendidikan publik :

- Sebagian kelompok nasionalis yang memiliki fundamental *laïcité* kuat menyambut hangat adanya pelarangan ini dengan indikasi ‘excellent’ , ‘good news’ atau dengan umpatan sebagaimana di atas karena menganggap abaya sebagai simbol agama Islam – yang notabene radikal dan ekstrem.
- Terdapat ujaran ketidaksepahaman atas respon kaum nasionalis dan kaum feminis. Kaum feminis lebih condong pada argumennya untuk tidak memarginalisasi pakaian yang dikenakan Wanita Prancis, tak terkecuali Muslimah. Bahkan terdapat guru yang
- memberi kelonggaran atas abaya ini di sekolah privatnya, dan kalangan ini pun mendapat kecaman dan ketidaksetujuan para kaum nasionalis *laïcité*.
- Bahkan kaum ultra-nasionalis Prancis menolak keras hijab, *Niqab*, abaya yang merepresentasikan muslim karena menganggap bahwa itu bukan budaya mereka.

Tabel 2

Tweet yang Mengarah pada Penolakan Penggunaan Abaya

No	Tanggal	Username	Isi Postingan (Fr)	Isi Postingan (Eng)	Like	Link Twitter
1	08/12/2023	@ALeaument	Éric Ciotti se dévoile. Il a un problème avec une seule religion : l’Islam. Ce n’est pas à la hauteur du principe de laïcité.	Éric Ciotti reveals himself. He has a problem with only one religion: Islam. This does not live up to the principle of secularism	1.2 k	<a href="https://twitter.com/ALeaument/status/1732815293636804915">https://twitter.com/ALeaument/status/ 1732815293636804915</a>

Tabel 2 (Lanjutan)

2	26/10/2023	@Mathilde Panot	Armita n'avait que 16 ans. Elle est en état de mort cérébrale pour n'avoir pas mis son voile. Je tiens ici à lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les iraniennes en lutte pour leur liberté. Parce que le corps des femmes n'appartient qu'à elles, nous ne cesserons jamais le combat. #FemmeVieLiberté	Armita was only 16 years old. She is brain dead for not having put on her veil. I would like to pay tribute here, as well as to all Iranian women fighting for their freedom. Because women's bodies belong only to them, we will never stop the fight. #FemmeVieLiberté	2.3 k	<a href="https://twitter.com/MathildePanot/status/17175400209201364">https://twitter.com/MathildePanot/status/17175400209201364</a>
3	13/09/2023	@helena_chnt	J'étais présente au rassemblement devant le ministère de l'éducation appelé par les personnels du lycée Utrillo, pour réclamer plus de moyens et dénoncer la politique Islamophobe du gouvernement. Il va falloir s'organiser et lutter collectivement.	I was present at the rally in front of the Ministry of Education called by the staff of the Utrillo high school, to demand more resources and denounce the government's Islamophobic policy. We will have to organize and fight collectively.	1.1 k	<a href="https://twitter.com/helena_chnt/status/1701989282808766862">https://twitter.com/helena_chnt/status/1701989282808766862</a>



Tabel 2 (Lanjutan)

4	13/10/2023	@RAF97483	J'ai bien aimé l'allocution de #Macron20h, mais quand il me parle d'unité à la fin, pardon... mais après ce qui c'est passé en Israël, j'ai aucune envie de vivre à côté de gens qui sont capables de ça	I really liked #Macron20h 's speech, but when he talks to me about unity at the end, sorry... but after what happened in Israel, I have no desire to live next to people who are capable of that	24	<a href="https://twitter.com/Groovision/status/1712554910695481352">https://twitter.com/Groovision/status/ 1712 5549 1069 5481 352</a>
5	06/09/2023	@Nawell_sjd	Le harcèlement scolaire explose mais leur combat c'est l'abaya	School bullying is exploding but their fight is the abaya	2	<a href="https://twitter.com/Nawell_sjd/status/1699364972512313709">https://twitter.com/Nawell_ sjd/status/ 1699 3649 7251 2313 709</a>

Data yang disajikan pada Tabel 2 mencerminkan beragam pandangan terhadap isu-isu sosial-politik, khususnya yang berkaitan dengan Islam dan perempuan di Prancis. Meskipun tidak semua tweet secara eksplisit membahas abaya, beberapa di antaranya memberikan wawasan tentang sentimen publik yang secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan perdebatan seputar penggunaannya.

Salah satu tweet yang secara implisit mengkritik fokus pada abaya adalah tweet dari @Nawell\_sjd. Alih-alih secara langsung menentang atau mendukung pemakaian abaya, tweet ini justru menyoroti kontras antara perhatian yang diberikan pada abaya dengan masalah perundungan di sekolah yang dianggap lebih mendesak. Dengan menyatakan bahwa "*harcèlement scolaire explose mais leur combat c'est l'abaya*," @Nawell\_sjd mengimplikasikan bahwa fokus pada abaya mengalihkan perhatian dari isu yang lebih penting dan berdampak langsung pada kesejahteraan siswa. Ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kritik tersirat terhadap kebijakan yang memprioritaskan simbolisme agama daripada isu-isu praktis di lingkungan sekolah.

Tweet lain yang relevan, meskipun tidak secara langsung membahas abaya, adalah tweet dari @helena\_chnt. Tweet ini melaporkan partisipasinya dalam demonstrasi yang menentang kebijakan “Islamophobia” pemerintah. Meskipun tidak spesifik menyebutkan abaya, kritik terhadap Islamofobia dapat dikaitkan dengan perdebatan seputar abaya, karena larangan abaya seringkali dikritik sebagai manifestasi dari sentimen anti-Islam. Dengan demikian, tweet ini memberikan konteks yang lebih luas tentang iklim sosial-politik di mana perdebatan tentang abaya terjadi.

Sehingga dapat dipahami bahwa data yang disajikan menunjukkan kompleksitas perdebatan seputar Islam dan simbol-simbol keagamaan di Prancis. Meskipun hanya satu tweet yang secara implisit mengkritik fokus pada abaya, tweet-tweet lain memberikan konteks yang berharga untuk memahami dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi perdebatan ini. Data ini juga menunjukkan bagaimana isu abaya seringkali terjalin dengan isu-isu lain seperti sekularisme, kebebasan beragama, dan diskriminasi.

Pada konteks perayaan Hannukah di Lysee Palace (Upacara Tradisional Yahudi) : kaum nasionalis tetap berpendirian atas *laïcité* mereka yang sudah ada sejak akhir abad 18. Sehingga jika dianggap bahwa segala kebijakan yang dirasa terlalu sensitif dalam dua dekade terakhir, itu bukan mengindikasikan Islamofobia, melainkan ialah sudah lumrah dan seharusnya demikian.

Tak hanya dua golongan tersebut, banyak golongan netral yang menyayangkan adanya inkonsistensi aktor politik, mereka pun menyadari bahwa sasaran *laïcité* adalah Islam saja, seperti halnya sejumlah transkrip postingan *Twitter* di bawah ini.

Namun terlepas dari inti argumen segala kelompok di atas, lagi-lagi praktik *laïcité* ini tidak dibarengi dengan lingkungan yang netral. Terdapat sentimen publik yang serius. Bahkan warga Prancis sendiri terpecah atas beberapa golongan yang membuat mereka juga turut saling mengkritik. Perlu dinetralkan kembali bagaimana regulasi dan tindakan yang dilakukan pemerintahan dapat sejalan dengan cita-citanya bahwa terdapat kebebasan rakyatnya melaksanakan ibadah tanpa campur tangan pemerintah begitu juga sebaliknya.

Pada dasarnya memandang dari sudut syariah Islam, hijab, *Niqab*, *Burqa* dan abaya adalah ibadah bagi kaum Muslimah untuk menutup auratnya dengan sempurna. Mengapa regulasi Prancis mengindikasikan

bahwa adanya diskriminasi dan rasialisasi? Hal ini tidak lain karena lagi-lagi politik mengganggu ajaran agama yang telah diperintahkan. Jika regulasi ini bertujuan untuk mencegah radikalisme, terorisme dan upaya kesetaraan dalam multikultural. Peneliti memandang bahwa kebijakan terkait seakan menekan, bukan mengedukasi. Radikal dan ekstrimisme adalah terkait ideologi, sebaiknya Prancis menunjukkan politik netral dan harmonisnya sehingga dapat muncul nasionalisme pada seluruh warganya. Karena mau bagaimanapun rakyat lokal pribumi mereka tak terkecuali juga ada yang beragama Islam, tak hanya imigran saja.

### **Bentuk Rasialisasi *Laïcité*, kasus Islam**

Pada bulan Oktober dan November 2019, “serangan teror - rangkaian Islamofobia” yang signifikan terjadi setelah serangan terhadap Markas Besar Kepolisian Paris pada tanggal 3 Oktober oleh seorang muallaf (4 orang tewas, 4 orang terluka). Setelah kejadian ini, Presiden Macron memulai kampanye yang menargetkan seluruh populasi Muslim. Menyerukan “*watchdog society*” “masyarakat pengawas” dan menghasut masyarakat Prancis untuk memeriksa “sinyal-sinyal radikalisasi yang lemah,”. Macron dan Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner menghubungkan terorisme dengan perilaku dan budaya muslim yang biasa (seperti memelihara jenggot, salat lima waktu, makan makanan halal, tidak berciuman dengan lawan jenis, dan lain-lain). Pemerintah dan banyak media secara implisit menampilkan komunitas Muslim sebagai pihak yang bertanggung jawab dan kaki tangan dari serangan tersebut, melompat dari satu kontroversi ke kontroversi lainnya di tahun-tahun sebelumnya. Kejadian ini juga memperlihatkan ambiguitas kebijakan antiterorisme Prancis yang secara resmi berdiri di atas dua prinsip utama (Bayrakli and Hafez 2020): 1) “memerangi radikalisasi kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme (individu-individu ini diawasi dan dituntut, jika terbukti berbahaya)”; dan 2) “memerangi komunitarianisme<sup>3</sup> dan praktik yang menyimpang dari Islam.”

Jika prinsip pertama merupakan tindakan yang sah untuk menjaga ketertiban umum, prinsip kedua tidak jelas dan samar-samar, serta mengancam hak-hak dan cara hidup warga negara Muslim Prancis.

<sup>3</sup> “Komunautarisme” adalah istilah Perancis yang secara negatif menggambarkan “kehidupan komunitas” sebagai ancaman ontologis terhadap kesatuan bangsa Perancis, untuk informasi lebih lanjut, lihat: Fabrice Dhume, “Communautarisme, une catégorie mutante”, *La Vie des Idées*, 25 September 2018, <https://laviedesidees.fr/Communautarisme-une-categorie-mutante.html>, (Tanggal akses: 12 Desember 2023). Ungkapan “komunautarisme” berfungsi sebagai perintah untuk mempertahankan minoritas dalam status subaltern mereka

Laporan ini menunjukkan argumen yang terakhir ini dan mengungkapkan bagaimana Islamofobia bekerja sebagai rasisme negara dalam berbagai cara.

Konstitusi tahun 1958 menyebutkan bahwa “Prancis adalah tak terpisahkan, sekuler (*laïque*), demokratis, dan Republik sosial. Ini menjamin kesetaraan bagi semua warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan asal, ras, dan agama. Semua keyakinan dihormati” (Mudzakkir 2013). Namun dalam praksisnya, *laïcité* mengalami multitafsir. Terdapat dua kelompok besar, yakni golongan ‘*strict*’ dan ‘*soft*’. Golongan pertama berisi persatuan para guru, kalangan feminis dan kaum ‘Republikan’ berusaha menfundamentalis segala ruang publik kembali pada filosofi *laïcité* lama secara dengan ketat. Sedang golongan kontras, ‘*soft*’ bersifat lunak dan fleksibel dimana mereka saling toleran dan tolong-menolong antar agama. Juga turun menjadi donator dalam pengajaran agama di sekolah swasta. Dominasi kelompok kedua berasal dari pemimpin Kristiani, Yahudi, sebagian muslim Prancis dan advokat hak asasi manusia. Kelompok inilah yang juga turut mengancam kebijakan pemerintah yang bersifat rasisme dalam hal ekspresi identitas keagamaan (Mudzakkir 2013).

Stigmatisasi terhadap Muslim oleh Prancis paling dominan atas atribut Muslimah (*Niqab, Burqa*) (Indira Rafsitahandjani and Firdaus 2017). Nicholas Sarkozy tetap *kekeuh* bahwa *Burqa* bukanlah identitas agama, melainkan tanda ketundukan (*subseivence*), dan hal ini tidak diperkenankan di Prancis. Penggunaan *Burqa* ini pun tak hanya memihak Muslim, namun seluruh Perempuan tak diperkenankan menutup sebagian wajah atau bahkan seluruhnya. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan nilai dan budaya Prancis. “*We cannot accept to have in our country women who are prisoners behind netting, cut off from all social life, deprived of identity*” (“Sarkozy Speaks Out Against Burka” 2009).

Dalam artikel yang dinyatakan oleh Käsehage (2022), sejak pemenggalan kepala seorang guru Prancis, Samuel Paty, pada Oktober 2020, terjadilah polemik terkait Islam yang dipolitisasi. Terjadi ketegangan publik terkait kebijakan dalam negeri dan kebebasan beragama Prancis. Terkait pengucilan, diskriminasi dan tindak kekerasan lain atas dasar Islamofobia terhadap muslim dan pemerintah yang demikian, membuat implikasi yang kian buruk pada angka radikalisasi kaum muda dan aksi terorisme yang berakar pada Jihad. Dalam artikel Abdel-Fattah (2020),

disebutkan bahwa dalam wawancara mendalam kepada kelompok wanita jihadis yang merasa termarginalisasi dan merasa bahwa ia sudah terasing di negara sendiri. Berikut dua pernyataan yang telah penulis sarikan dari wawancara (Käsehage 2022):

Saya diperlakukan seperti orang asing di Paris meskipun ini adalah kampung halaman saya. Orang-orang tua memalingkan wajah mereka ketika saya menyeberang jalan dan beberapa di antaranya meludah dan mengejek tentang jilbab saya.

Saya orang Prancis. Ini adalah negara saya. Kakek dan nenek saya datang dari Maroko ke Prancis dan membuka beberapa toko sayuran. Orang tua saya bekerja di sana dan saya juga bekerja di sana. Kami membayar pajak seperti orang Prancis lainnya, tetapi kami diperlakukan seperti orang bodoh. Sangat menyakitkan bagi saya melihat nenek saya diperlakukan seperti anjing karena ia mengenakan cadar. Mereka bisa menyakiti saya, saya tahu bagaimana cara membela diri, tapi dia diam. Dia tidak akan pernah meninggalkan suaranya untuk melawan para penyerangnya. Rasanya saya harus memilih antara negara dan keyakinan saya dan ini tidak adil.

Masih terus bergulir dalam urusan pakaian Muslimah, telah resmi terbit regulasi baru di 4 September 2023, yakni larangan penggunaan abaya di lingkungan sekolah. Lagi-lagi, muslimah yang termarginalisasi. Diliput oleh CCN World, bahwa 67 siswi memilih untuk dipulangkan daripada menanggalkan abaya mereka. Ambiguitas pun mewarnai sisi praktisnya. “Larangan itu telah diberlakukan dengan cara ‘sewenang-wenang’ karena tidak mengandung definisi hukum tentang seperti apa bentuk abaya. Abaya juga tidak pernah secara resmi diklasifikasikan sebagai barang keagamaan”, menurut Brengarth, salah satu narasumber CNN BFMTV. Kontroversi pun masih melekat dalam lingkungan sosial Prancis, tak terkecuali ketegangan yang ditimbulkan setelahnya (Mawad, Kennedy, and Guy 2023).



Gambar 2

### Perayaan festival Hanukkah Yahudi di Istana Elysee

Terdapat satu kasus lagi yang sangat problematik yang secara gamblang merepresentasikan rasialisasi implementasi *laïcité*, yakni menyalanya lilin Hanukkah di Istana Kepresidenan Prancis, Elysee Palace pada 8 Desember 2023 lalu. Gambar 2 merupakan sebuah postingan *Twitter* yang dapat mewakili argumenasi peneliti terkait politisasi Islam oleh Prancis. Ditulis oleh Dr. Muhammad al-Hachimi al-Hamidi, Penulis, Ketua Umum Almustakillah TV. PhD. SOAS, Univ. of London. Dia menyangkan konsep implementasi *laïcité* yang kurang adil bagi seluruh agama naungan Prancis. Dia berkata:

Prancis mengibarkan panji sekulerisme hanya di hadapan Islam. Mereka mengibarkannya untuk melecehkan #Muslim Prancis dan membenarkan #Islamofobia. #Prancis mengibarkannya untuk melarang hijab dan abaya, dan untuk membenarkan pelecehan terhadap orang yang paling mulia di antara umat manusia, Nabi

Islam, Muhammad (saw). Bahkan pemandangan seorang gadis muda yang berkompetisi dalam pertandingan olahraga dengan hijab pun dilarang oleh Prancis atas nama sekulerisme. Tapi #Prancis yang 'sekuler' tidak merasa keberatan untuk merayakan festival Hanukkah Yahudi di Istana Elysee, istana kepresidenan dan pemerintahan, oleh Presiden republik 'sekuler' itu sendiri. Ini adalah kemunafikan dalam manifestasi yang paling mencolok (Al-Hamidi 2023).

Dalam kronologisnya, agenda kenegaraan ini dilatarbelakangi oleh Emmanuel Macron yang menerima penghargaan untuk perjuangannya melawan anti-Semitisme (seperti Angela Merkel pada 2013). Itulah sebabnya ia dikelilingi oleh para pemimpin agama dan perwakilan komunitas Yahudi, pada hari pertama liburan tradisional Hanukkah.

Seorang rabi menyalakan lilin Hanukkah pada hari pertama festival lampu tradisional Yahudi ini, di Istana Élysée dan di bawah pengawasan Presiden Republik. Gambar-gambar yang difilmkan pada Kamis malam di istana kepresidenan menimbulkan kontroversi pada Jumat pagi, dan menyebabkan ledakan kritik dan reaksi marah terhadap Emmanuel Macron, yang dituduh menginjak-injak sekulerisme (Faure 2023).

Apabila diulik lagi secara mendalam, itu berakar atas Islamofobia – disahkan kebijakan marginal pemerintah – ditambah dengan tindak diskriminatif warga lokal terhadap Islam – kemudian muncullah aksi teror dan radikal 'baru' dalam merespons tindakan diskriminatif tersebut. Kesemuanya memiliki implikasi yang saling meresonansi serta menjadi rantai yang sulit terputus apabila tak ada yang menetralsir ketegangan yang terjadi antara konflik Prancis dan agama Islam.

## Kesimpulan

Sebagai upaya mengidentifikasi geliat *laïcité* yang ada di Prancis saat ini, penulis telah mengkaji berbagai tweet yang diunggah oleh warga lokal Prancis pada rentang 2023 dan menghimpun beberapa sumber sekunder guna memperdalam informasi atas implementasi di wilayah yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2023 terdapat dua peristiwa yang disoroti, yakni pelarangan abaya di lingkungan sekolah dan adanya perayaan Hannukah (upacara tradisional Yahudi) di Istana Kepresidenan. Hasil eksplorasi *tweet* menunjukkan pengklasifikasian opini publik ke dalam kaum feminis (dalam hal abaya), kelompok nasionalis yang berpegang pada *laïcité*, dan kaum humanis netral yang sekilas turut

mengkritik rasialisasi tindakan politik yang ada. Disamping banyaknya umpatan dan bentuk pengusiran tersirat pada kaum muslim yang berusaha mengoposisi kebijakan pemerintah, juga terdapat bentuk rasialisasi secara nyata yang terimplementasi di kehidupan nyata – yang penulis kutip dari sumber sekunder – nampak bahwa masyarakat pun menganggap populasi muslim menjadi bagian luar dari negaranya sendiri, walau tanah air mereka sejak lahir ialah Prancis.

Adanya tendensi antara pemerintah, warga lokal dan agama tertentu yang demikian tentu akan menjerumuskan praktik-praktik penyelewengan lain atas nama agama – sebagai tanda balas dendam. Islam sendiri tak mengandung sedikit pun kata ekstrem, radikal bahkan aksi terror pengeboman. Nilai *rahmatan-lil-‘alamin*-lah yang menjadi landasan bermuamalah dan bersosial. Dalam kasus Prancis, jika praktik agama dan politik yang selalu bergesekan ini tak segera dihentikan, maka konflik dan polemik yang akan terjadi di masa mendatang tak mudah dibendung dengan mudah.

Namun segala penelitian memiliki limit, peneliti merekomendasikan pada penulis selanjutnya untuk memunculkan upaya *laïcité* yang secara fokus menginterpretasikan bagaimana lingkungan akademik Prancis yang sekuler di era kini guna meluruskan bagaimana konsep *laïcité* konkrit yang dicita-citakan oleh negara Prancis. Sebagai penutup, peneliti membuka lebar pintu kritikan dan sanggahan pada kepenulisan ini guna mengekspansi kajian Islam, politik dan kesejarahan Eropa yang lebih luas.

## Referensi

- Al Jazeera. 2019. “A Summary of Attacks on Muslims in Western Countries.”
- Abdel-Fattah, R. 2020. “Countering Violent Extremism, Governmentality and Australian Muslim Youth as ‘Becoming Terrorist.’” *Journal of Sociology* 56 (3): 372–87. <https://doi.org/10.1177/1440783319842666>.
- Al-Hamidi, Muhammad al-Hachimi. 2023. “Postingan Twitter 1.”
- Ali, Rabia. 2023. “European Countries Legalizing Islamophobia, Limiting Religious Practices of Muslims, Says Expert.” *Anadolu Anjasi*.



- Bayrakli, Enes, and Farid Hafez. 2020. *European Islamophobia Report 2019*. Istanbul: SETA.
- Bayrakli, Enes and Farid Hafez. 2023a. *European Islamophobia Report (EIR) 2022*. Austria: Leopold Weiss Institute. <https://doi.org/10.47951/mediad.1302245>.
- Bayrakli, Enes and Fariz Hadez. 2023b. "European Islamophobia Report (EIR) 2022." *Medya ve Din Araştırmaları Dergisi* 6 (1): 221–25. <https://doi.org/10.47951/mediad.1302245>.
- Bell, David Andreas, Marko Valenta, and Zan Strabac. 2021. "A Comparative Analysis of Changes in Anti-Immigrant and Anti-Muslim Attitudes in Europe: 1990–2017." *Comparative Migration Studies* 9 (1): 57. <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00266-w>.
- Corral, Alfonso, David De Coninck, Stefan Mertens, and Leen D’Haenens. 2023. "Gauging the Media Discourse and the Roots of Islamophobia Awareness in Spain." *Religions* 14 (8): 17. <https://doi.org/10.3390/rel14081019>.
- Cremer, Tobias. 2023. "The Rise of the Post-Religious Right: Christianity and Secularism in the French Rassemblement National." *Party Politics* 29 (1): 40–50. <https://doi.org/10.1177/13540688211046859>.
- Czymara, Christian S., Stephan Dochow-Sondershaus, Lucas G. Drouhot, Müge Simsek, and Christoph Spörlein. 2023. "Catalyst of Hate? Ethnic Insulting on YouTube in the Aftermath of Terror Attacks in France, Germany and the United Kingdom 2014–2017." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 49 (2): 535–53. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2022.2100552>.
- EUMC. 2006. *Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia*. EU Publications.
- Farkhani, Farkhani, Zakiyuddin Baidhawiy, and Adang Kuswaya. 2021. "Islamophobia in Spain: Inheritance of Reconquista and Hate Political Rhetoric." *Journal of Al-Tamaddun* 16 (1): 65–79. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no1.5>.
- Faure, Justine. 2023. "Bougie d’Hanouka Allumée à l’Élysée : Les Réactions Se Multiplient, Macron Se Défend et Appelle ‘Au Bon

- Sens.” TFI Info.
- Fekete, Liz. 2004. “Anti-Muslim Racism and the European Security State.” *Race & Class* 46 (1): 3–29. <https://doi.org/10.1177/0306396804045512>.
- Fornerod, Anne. 2023. “École et Religion En Droit Français.” *Anuario de Derecho Eclesiástico Del Estado* xxxix (October). [https://doi.org/10.55104/ADEE\\_00007](https://doi.org/10.55104/ADEE_00007).
- Indira Rafsitahandjani, Nadza, and Aos Y Firdaus. 2017. “Dinamika Pelarangan Niqab Dan Burqa Di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis Dan Belgia.” *Jurnal Interdependence* 5 (3): 109–23.
- Islamy, Putri Raisa, and Lusi Andriyani. 2021. “Islamophobia Di Jerman Dan Prancis.” *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2 (2): 37. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.37-46>.
- Kalmar, Ivan. 2018. “Islamophobia in the East of the European Union: An Introduction.” *Patterns of Prejudice* 52 (5): 389–405. <https://doi.org/10.1080/0031322X.2018.1512467>.
- Kalmar, Ivan. 2020. “Islamophobia and Anti-Antisemitism: The Case of Hungary and the ‘Soros Plot.’” *Patterns of Prejudice* 54 (1–2): 182–98. <https://doi.org/10.1080/0031322X.2019.1705014>.
- Käsebage, Nina. 2022. “No Country for Muslims? The Invention of an Islam Républicain in France and Its Impact on French Muslims.” *Religions* 13 (1): 38. <https://doi.org/10.3390/rel13010038>.
- Khamis, Sahar. 2023. “Effective Countering Islamophobia Strategies in the Digital Age: Three Approaches.” *Islamophobia Studies Journal* 8 (1): 25–41. <https://doi.org/10.13169/islastudj.8.1.0025>.
- Labidi, Imed Ben. 2021. “Hollywood’s Bad Muslims: Misrepresentations and the Channeling of Racial Violence.” *The Journal of Religion and Popular Culture* 33 (3): 126–37. <https://doi.org/10.3138/jrpc.2020-0068>.
- Lauwers, Anna Sophie. 2019. “Is Islamophobia (Always) Racism?” *Critical Philosophy of Race* 7 (2): 306–32. <https://doi.org/10.5325/critphilrace.7.2.0306>.
- Leyva, Karel. 2016. “Multiculturalisme et Laïcité En France : Les Trois Républicanismes Du Rapport Stasi.” *Dialogue* 54 (4): 647–84. <https://doi.org/10.1017/S0012217316000020>.

- Malogne-Fer, Gwendoline. 2017. "Jean Baubérot, Les 7 Laïcités Françaises. Le Modèle Français de Laïcité n'existe Pas." *Archives de Sciences Sociales Des Religions*, no. 180 (December): 275–78. <https://doi.org/10.4000/assr.33377>.
- Massoumi, Narzanin. 2020. "Why Is Europe so Islamophobic?" *The New Work Times*.
- Mawad, Dalal, Niamh Kennedy, and Jack Guy. 2023. "French Schools Turn Away Girls Wearing Abayas as Muslim Rights Group Challenges Ban." *CNN World*.
- Mendelski, B. 2019. "Islamophobia as an Illiberal Action: The Case of Germany and France." In *Global and Regional Powers: Relations, Problems and Issues in the 21st Century*, edited by Fulya Köksoy, 187–266. Peter Lang D. <https://doi.org/10.3726/b16239>.
- Mudzakkir, Amin. 2013. "Amin Mudzakkir Sekularisme Dan Identitas Muslim Eropa." *Jurnal Kajian Wilayah* 4 (1): 92–105.
- Omar, Sayfo. 2020. "Hollywood (Mis)Representations Of Arabs And The Middle East From A Production Perspective - The Case Of Fx Channels Tyrant." *SERIES: International Journal of TV Serial Narratives* 6 (1): 43–56. <https://doi.org/10.6092/issn.2421-454X/10285>.
- Peker, Efe. 2021. "Right-Wing Populism and the Securitisation of Laïcité Narratives in French Education Policy." *Social Policy and Society* 20 (2): 326–39. <https://doi.org/10.1017/S1474746420000652>.
- Politzer, Malia Nora, and Antonia Olmos Alcaraz. 2023. "Islam, Media Framing and Islamophobia in the US Press, before and after the Charlie Hebdo Terrorist Attack." *Critical Studies on Terrorism* 16 (2): 351–69. <https://doi.org/10.1080/17539153.2023.2207164>.
- Ragazzi, Francesco. 2023. "Counter-Radicalization, Islam and Laïcité: Policed Multiculturalism in France's Banlieues." *Ethnic and Racial Studies* 46 (4): 707–27. <https://doi.org/10.1080/01419870.2022.2032248>.
- Rofiqi, M. Aris. 2002. "Benturan Peradaban Islam Dan Barat." *Jurnal*

---

*Studi Islam* 2 (1): 1–21.

- “Sarkozy Speaks Out Against Burka.” 2009. BBC. 2009.
- Scrinzi, Francesca. 2023. “France.” In *Routledge Handbook of Violent Extremism and Resilience*, 113–24. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003267102-9>.
- Simpson, Patricia Anne. 2020. “Gendered Identities and German Islamophobias.” *Journal of Contemporary European Studies* 28 (1): 57–69. <https://doi.org/10.1080/14782804.2019.1679099>.
- Sukabdi, Zora Arfina, Muhammad Adlin Sila, Chandra Yulistira Purnama, Fathul Lubabin Nuqul, Seta Ariawuri Wicaksana, Ali Abdullah Wibisono, and Yanwar Arief. 2023. “Islamophobia among Muslims in Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 9 (1): 29. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2209367>.
- Sukarwo, Wirawan. 2020. “Hambatan Integrasi Identitas Muslim Di Barat: Penelusuran Konsep Humanisme, Perang Salib, Dan Tantangan Masa Depan.” *Human Narratives* 2 (1): 15–25. <https://doi.org/10.30998/hn.v2i1.584>.
- Wijaya, Subur, and Mirza Nursyabani. 2022. “Menangkal Islamofobia Melalui Interpretasi Ayat-Ayat Moderasi Perspektif Mufassir Kontemporer.” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3 (1): 19–32. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.58>.